

PERSPEKTIF ETNIK SITUASIONAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD PADA WILAYAH MULTI ETNIK

2

*Oleh : Muhammad Marzuki***ABSTRAK**

Sentimen etnik seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika dalam arena demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik struktur politik pada level lokal atau daerah.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Multi Etnik, Anggota Dewan.

Pendahuluan

Identifikasi identitas etnik sebagaimana lazim terjadi pada masyarakat yang multietnik senantiasa tergantung pada situasi dan konteks dimana seseorang berada. Dalam konteks politik di wilayah yang multietnik, terutama pada lembaga seperti DPRD, identifikasi identitas etnik menjadi kemestian. Mengidentifikasi seseorang berdasarkan etnik adalah bagian dari perilaku dan tindakan komunikasi baik dalam aktifitas dan peran politik maupun dalam kehidupan sosial secara umum, terutama dalam rangka menarik simpati calon pemilih, meningkatkan popularitas dan tujuan politik lainnya. Keadaan ini jika dicermati relevan dengan asumsi Fredrik Barth (dalam Mulyana, 2002) yang menyebutnya sebagai *situational ethnicity*.

Dalam masyarakat yang multietnik, dinamika politik senantiasa memiliki “tegangan” yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif homogen (LSI, 2008). Hal tersebut dapat di lihat pada kontestasi politik di tingkat lokal pada beberapa pilkada provinsi, kabupaten dan kota yang selalu menyita perhatian

pemerintah, pengamat politik maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, daerah asal, putra daerah atau pendatang. Simbol-simbol tersebut kerap dijadikan isu politik dalam sosialisasi dan komunikasi politik para calon yang bersaing, baik dalam jabatan politik seperti eksekutif (gubernur, bupati, walikota) dan legislatif (DPR Kabupaten, Kota dan Provinsi) .

Wacana etnik tersebut banyak muncul pada wilayah yang heterogen. Beberapa daerah provinsi di Indonesia yang penduduknya heterogen dari segi etnik dan agama seperti Riau Kepulauan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara. Diantara wilayah-wilayah tersebut, isu-isu etnisitas yang berkembang dalam pemilu atau pilkada juga beragam, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah isu agama cukup menonjol. Sementara di wilayah lain isu yang menonjol adalah isu etnik, pendatang dan putra daerah.

Sentimen etnik seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika dalam arena demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik struktur politik pada level lokal atau daerah.

Banyak ahli politik mengatakan bahwa faktor etnisitas tidak lagi cukup berpengaruh dalam kontestasi politik pada level nasional. Diantaranya, Mallarangeng, (1997); William Liddle & Saiful Mudjani, (2007) menyatakan bahwa faktor etnik dan agama tidak lagi merupakan isu utama yang berpengaruh dalam kontestasi politik nasional. Tetapi dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ananta *et.al*, (2004) sebaliknya, bahwa faktor etnisitas masih merupakan jualan yang laku dalam politik Indonesia. Alasan utama

yang diajukan adalah karena para pemilih di Indonesia sangat sedikit yang memilih berdasarkan pertimbangan rasional.

Perdebatan pada level nasional tentu saja akan berbeda jika dihadapkan pada kasus-kasus daerah. Seperti hasil penelitian Suryadinata (2004) pada beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa faktor etnik masih sangat kuat mempengaruhi pilihan politik di daerah. Terutama pada wilayah kabupaten di Indonesia Timur yang tingkat heterogenitas penduduknya sangat tinggi. Meminjam pernyataan, Tamrin Amal Tomagola (2007:21), yang menyatakan bahwa Indonesia Timur adalah kepingan-kepingan kecil dalam peta etnik di Indonesia. Artinya entitas etnik di Indonesia Timur ditemukan dalam wilayah-wilayah yang relatif sempit, ada etnik yang mendiami satu atau dua kabupaten, satu kecamatan, satu desa bahkan satu kampung dihuni oleh dua etnik. Sebagai contoh, etnik Sunda secara relative mendiami seluruh wilayah Jawa Barat sementara etnik Buol hanya mendiami Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah. Di tempat lain di Kwankilama, Papua, satu kampung akan dihuni oleh dua etnik yang berbeda.

Perspektif Etnik Situasional Barth

Adanya perbedaan etnis dalam interaksi sosial tidak seharusnya melepaskan identitas etnik seseorang walaupun antara kedua etnik yang hidup berdampingan diantara masyarakat yang berbeda budaya. Akan tetapi keharmonisan dan hubungan antaretnik merupakan kemutlakan guna menjalani kehidupan yang lancar. Dipihak lain tidak ada satu budaya pun yang tidak dipngaruhi oleh budaya lain. Demikian halnya budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya yang minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri, (Barth, 1988:10) disebutkan ada dua pandangan soal ini: *Pertama*, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dalam perjalanan hidup seseorang. *Kedua*, dapat ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama, dan

penting diantara dua kelompok etnik yang berbeda, yang biasanya terjadi kerana adanya status etnik yang berbeda tersebut tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi sebaliknya justru karena disadari oleh terbentuknya system sosial tertentu.

Dengan kata lain kelompok etnik ditentukan oleh batas-batas dan mempunyai atau berciri khas yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Di samping itu batas budaya dapat bertahan walaupun diantara dua etnik dapat berbaur. Adanya perbedaan etnis dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses perupa pemisahan dan penyatuan sehingga perbedaan dapat dipertahankan dalam perjalanan hidup seseorang. Di samping itu hubungan sosial dalam masyarakat yang begitu lama dan berjalan sedemikian rupa dalam masyarakat yang multietnik biasanya terjadi lebih disebabkan adanya status etnik. Demikian halnya masing-masing kelompok etnik yang berbeda tersebut didasari oleh terbentuknya system sosial dalam masyarakat (Barth, 1988:11), disebutkan kelompok etnik yang : secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, mempunyai jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan cirri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi yang lain.

Setiap etnik secara biologis dapat berkembang dan bertahan serta mempunyai nilai-nilai budaya dan moral sehingga menjadi cirri khas etnik tersebut. Demikian halnya setiap etnis ditandai dengan system komunikasi dan berinteraksi sekaligus cirri kelompok etnik tersebut dapat diterima dan dapat dibedakan dengan kelompok lain. Setiap etnik dalam masyarakat yang telah mapan, batasan etnik sangat jelas sehingga interaksi antaretnik ditandai dengan system sosial yang telah disepakati. (Barth, 1988:16) menyebutkan bahwa bila sebuah kelompok tetap mempertahankan identitasnya sementara anggotanya berinteraksi dengan kelompok lain, hal ini menandakan adanya suatu criteria untuk menentukan keanggotaan dalam kelompok tersebut dan ini merupakan cara untuk menandakan mana yang anggota kelompoknya dan mana yang bukan. Kelompok etnik bukan semata-mata ditentukan oleh wilayah yang didudukinya; berbagai cara digunakan untuk mempertahankan kelompok ini,

bukan dengan cara sekali mendapatkan untuk seterusnya, tetapi dengan pengungkapan dan pengukuhan yang terus menerus.

Batas etnik menyalurkan kehidupan sosial sehingga merupakan tatanan sosial dan hubungan sosial yang kompleks. Mengidentifikasi seseorang dalam suatu kelompok etnik sekaligus merupakan criteria etnik baginya. Disamping itu seseorang dikatakan asing atau orang lain dari kelompok etniknya maka dalam hal ini adanya pembatasan dalam pengertian bersama baik mengenai nilai-nilai maupun adanya interaksi dalam masyarakat. Barth (1988:17) menyebutkan kelompok etnik hanya dikenal sebagai unit bila kelompok itu memperlihatkan perilaku yang berbeda, jadia ada perbedaan budaya. Tetapi bila orang-orang dengan budaya yang berbeda berinteraksi, diharapkan perbedaan akan berkurang, sebab interaksi memerlukan dan membentuk kesatuan tanda dan nilai atau dengan kata lain, harus ada budaya yang sama atau umum.

Di dalam masyarakat dimanapun kontak budaya tidak dapat dihindari sehingga hubungan antarbudaya tersebut menjadi kemutlakan guna lancarnya interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Untuk dapat berpartisipasi dalam ssstem sosial di masyarakat dalam memilih strategi sebagai berikut:

1. Mereka berusaha untuk bergabung dan masuk ke dalam kelompok masyarakat dan budaya industri
2. Mereka menerima status minoritas dan berusaha mengatasi dan mengurangi minoritasnya dengan cara membatasi budayanya hanya pada sector kegiatan yang tidak dikerjakan bersma. Sekaligus berperan serta dalam kelompok industry yang lebih besar untuk kegiatan lainnya.
3. Mereka baru menonjolkan identitas etniknya, dan menggunakannya untuk mengembangkan posisinya dan kegiatan yang selama ini belum terjamah dalam masyarakat ini (Barth, 1988:35)

Etnik Situasional dalam Komunikasi Politik

Sebagai salah satu perspektif dalam memahami identitas etnik seseorang dalam komunikasi politik yang menarik sebagai alat analisis adalah perspektif *situational ethnicity* yang dikembangkan Fredrik Barth. Pendekatan Barth tentang identitas etnik sebenarnya didasari oleh konsep-konsep penelitian sosial yang dikembangkan dari perspektif interaksionisme simbolik. Buchigani dalam

(Mulyana, 2006:140) menyatakan bahwa perspektif Barth adalah perpanjangan dari pendekatan Goffman terhadap diri. Suatu pandangan interaksionisme simbolik menyatakan bahwa konsep identitas etnik terletak pada teori-teori kontemporer tentang diri. Teori Mead tentang diri juga dapat diterapkan pada pembentukan identitas etnik, dalam arti konsep diri diletakkan dalam konteks etnik. Maka diri bersifat etnik dan terikat oleh budaya.

Oleh karena itu peran politik pada lingkungan yang multietnik, sebagaimana dialami anggota DPRD , juga akan tetap menampilkan identitas etnik sebagai sesuatu yang terikat oleh budaya. Identitas etnik anggota DPRD tersebut tentu saja tidak tunggal, karena pada dasarnya setiap individu memiliki beberapa identitas yang akan ditampilkan sesuai kepentingan. Perspektif ini menilai bahwa identitas etnik itu bersifat cair, dinamis dan situasional.

Keanggotaan DPRD merupakan peran politik yang sarat dengan kepentingan yang berasal bukan saja dari diri sendiri, partai politik, khalayak (konstituen) atau pihak lainnya. Sebagai arena pertarungan beragam kepentingan tersebut, seorang anggota DPRD dituntut untuk mampu mengartikulasikan setiap situasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada lembaga yang diisi oleh beragam etnik, seperti DPRD dinamika proses artikulasi kepentingan tidak hanya melibatkan persoalan ideologi, kesamaan visi dan misi atau motif lainnya tetapi juga pasti melibatkan kepentingan kelompok-kelompok yang menggunakan simbol-simbol etnik. Dalam situasi semacam ini, penggunaan beragam identitas etnik menemukan urgensinya, karena dengan begitu seorang anggota DPRD dapat mencapai tujuan politik baik melalui tekanan, lobi-lobi dan *power sharing* dengan memanfaatkan simbol-simbol etnik.

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai bagian integral dari data, artinya peneliti ikut terlibat aktif menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian peneliti menjadi instrument penelitian yang harus terjun langsung di lapangan mengamati obyek penelitian (observasi dan wawancara). Di sisi lain penelitian ini harus dilakukan secara subyektif dan hasilnya bersifat kasuistik.

Penjelasan konsep diri dalam hubungannya dengan identitas keetnikan yang dimaksud dalam tulisan ini, juga menggunakan konsep-konsep identitas etnik perspektif Frederik Barth. Perspektif Barth merupakan pengembangan lebih lanjut teori Goffman tentang

konsep diri secara kultural. Ia mengembangkan teorinya dalam konteks identitas etnik, yang disebutnya keetnikan situasional (*situational ethnicity*). Pada batas ini para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial (Mulyana, 2006:63). Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (*self image*) dan harga diri (*self esteem*) baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi.

Meskipun pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya, namun identitas keetnikan seseorang selalu menjadi hal utama dalam diri seseorang. Diantara sekian banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam diri seseorang. Identitas mengenai konsep diri seseorang terkait dengan kesadaran individu untuk tampil dan dinilai dalam suatu budaya tertentu inilah yang disebut identitas etnik. Sebagaimana di awal telah dijelaskan bahwa konsep etnik situasional mengungkapkan bahwa setiap individu akan melakukan proses komunikasi, melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks politik, hal ini menjadi menarik karena citra diri menjadi sangat penting dalam mencapai sukses baik dalam upaya mempengaruhi publik maupun dalam melaksanakan peran-peran politik. Situasi multietnik dan adanya beragam identitas yang dimiliki memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam identitas keetnikan seseorang.

Perspektif Barth mengilhami banyak ahli untuk meneliti apa yang disebut sebagai etnisitas situasional, yaitu bagaimana identitas etnik digunakan individu-individu dalam interaksi mereka dengan orang lain. Mereka menganggap identitas etnik sebagai dinamik, cair, situasional sebagaimana ditunjukkan Nagata (1974) Armstrong (1986), Mulyana (1994). Mereka menunjukkan bagaimana identitas etnik dan lambang-lambanganya dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sosial, ekonomi, dan politis tertentu.

Adanya perbedaan etnik dalam interaksi sosial tidak seharusnya melepaskan identitas etnik seseorang walaupun antara kedua etnik yang hidup berdampingan diantara masyarakat yang berbeda budaya. Akan tetapi keharmonisan dan hubungan antaretnik merupakan kemutlakan guna menjalani kehidupan yang lancar. Di pihak lain tidak ada satu budaya pun yang tidak dipengaruhi oleh budaya lain. Demikian halnya budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya yang minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri.

Barth (1988:10) menyebutkan dua pandangan soal ini; *Pertama*, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dalam perjalanan hidup seseorang. *Kedua*, dapat ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama, dan penting diantara dua kelompok etnik yang berbeda, yang biasanya terjadi kerana adanya status etnik yang berbeda tersebut tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi sebaliknya justru karena disadari oleh terbentuknya sistem sosial tertentu.

Dengan kata lain kelompok etnik ditentukan oleh batas-batas dan ciri khas yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Di samping itu batas budaya dapat bertahan walaupun diantara dua etnik dapat berbaur. Adanya perbedaan etnik dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses berupa pemisahan dan penyatuan sehingga perbedaan dapat dipertahankan dalam perjalanan hidup seseorang. Di samping itu hubungan sosial dalam masyarakat yang begitu lama dan berjalan sedemikian rupa dalam masyarakat yang multi-etnik biasanya terjadi lebih disebabkan adanya status etnik. Demikian halnya masing-masing kelompok etnik yang berbeda tersebut didasari oleh terbentuknya sistem sosial dalam masyarakat.

Setiap etnik secara biologis dapat berkembang dan bertahan serta mempunyai nilai-nilai budaya dan moral sehingga menjadi ciri khas etnik tersebut. Demikian halnya setiap etnik ditandai dengan sistem komunikasi dan berinteraksi sekaligus ciri kelompok etnik tersebut dapat diterima dan dapat dibedakan dengan kelompok lain. Setiap etnik dalam masyarakat yang telah mapan, batasan etnik sangat jelas sehingga interaksi antaretnik

ditandai dengan sistem sosial yang telah disepakati. Mekanisme mempertahankan batasan etnik menurut Barth (1988:20) menjadi lebih efisien. Mekanisme dalam mempertahankan batasan etnik sangat efisien, karena pertama, kompleksitas timbul berdasarkan adanya perbedaan budaya; kedua, interaksi antaretnik berlangsung atas dasar identitas etnik masing-masing; ketiga, ciri budaya kelompok harus dapat bertahan selama berlangsungnya interaksi antar etnik.

Dalam batas ini tegas dapat dikatakan bahwa menafikan persoalan batas-batas etnik dalam politik sebagaimana sering dilontarkan banyak orang adalah suatu hal yang keliru. Batasan etnik sebagaimana Barth (1988:23) jelaskan bahwa akan semakin jelas pada struktur masyarakat yang sudah mapan. Dengan demikian asumsi bahwa kegiatan komunikasi politik hanya akan diwarnai oleh persoalan ideologi partai dan kepentingan politik seseorang menjadi tidak berdasar. Bahwa kepentinganlah seorang politisi terdorong menggunakan pembeda melalui berbagai batasan etnik sebagai hal yang dapat diterima. Sebagaimana rancangan penelitian ini yang mengambil posisi pada upaya mengetahui bagaimana identitas etnik digunakan dalam komunikasi politik Anggota DPRD maka asumsi identifikasi identitas etnik mereka berdasarkan batasan-batasan etnik yang sudah jelas. Salah satu diantaranya adalah asal suku.

Beragamnya etnik masyarakat yang juga tergambar pada keanggotaan di DPRD memberikan kemungkinan munculnya bentuk pengelolaan identitas etnik untuk tujuan-tujuan atau kepentingan politik anggota DPRD. Etnik telah memberikan ruang bagi berlakunya pembeda untuk menetapkan mana “kawan” dan mana “lawan” meski hal tersebut tidak berlaku secara statis tetapi selalu berubah sesuai kepentingan, ruang dan waktu. Sebagaimana Barth menyatakan bahwa batas etnik menyalurkan kehidupan sosial sehingga merupakan tatanan sosial dan hubungan sosial yang kompleks. Mengidentifikasi seseorang dalam suatu kelompok etnik sekaligus menerapkan kriteria etnik baginya.

Dalam suatu komunitas, terutama dalam batas wilayah administratif sekaligus politis interaksi antara kelompok-kelompok etnik akan berlangsung sangat intensif terutama pada wilayah dengan penduduk relatif kecil seperti . Unit-unit identitas etnik akan dengan mudah dikenali, dengan demikian juga dapat melihat perbedaan dengan jelas. Mereka tidak hanya menunjukkan adanya kriteria dan tanda untuk identifikasi, tetapi juga membentuk struktur interaksi yang memungkinkan menetapkan perbedaan-perbedaan budaya. Hal mana dapat menjadi bagian dari upaya untuk menetapkan batasan

etnik. Batas identitas etnik berhubungan dengan nilai-nilai budaya yang dianut seseorang sehingga dalam berinteraksi dengan individu lainnya identitas etnik akan muncul, dan identitas tersebut biasanya dipertahankan oleh etnik yang bersangkutan.

Bingkai politik dalam hal ini tentu saja tidak akan menghilangkan atau mengurangi kemunculan etnik sebagai sebuah identitas yang dijadikan pembeda ataupun ko-identitas seorang anggota DPRD. Politik justeru lebih memungkinkan hadirnya beragam identitas untuk tujuan-tujuan praktis seperti menarik simpati publik melalui komunikasi politik dengan mengandalkan ragam isu yang berkaitan dengan etnik. Politisi dalam hal ini memerlukan strategi untuk menggunakan identitas etnik sesuai dengan situasi, kepentingan dan ruang yang tersedia demi tercapainya kepentingan politik mereka. Disinilah arti penting pemanfaatan beragam identitas yang dimiliki.

Munculnya identitas-identitas yang dikonstruksi sebagai pembeda untuk menentukan mana bagian dari “diri” atau “orang lain” dalam hubungannya dengan kepentingan politik, ekonomi dan budaya adalah bukti nyata hadirnya politisasi identitas etnik. Istilah “pendatang” atau bukan penduduk asli dalam konteks politik lokal menurut pandangan geopolitik sangat diskriminatif. Dengan identitas pembeda itu, seseorang dapat saja dikebiri hak-hak politik, ekonomi dan budayanya dengan dalih bukan penduduk asli, padahal dalam konsepsi negara kesatuan tentu saja semua warga negara memiliki hak yang sama dimanapun di negeri ini. Sebagaimana dalam aktifitas komunikasi politik di DPRD, identitas-identitas tersebut muncul sebagai bagian dari upaya identifikasi identitas pembeda atau ko-identifikasi.

Situasi ini mendorong setiap politisi melakukan upaya penyesuaian diri dalam lingkungan sosial yang multietnik. Kontak budaya yang terus berlangsung telah memungkinkan setiap orang memiliki banyak identitas yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi sesuai kepentingan. Hanya saja kelompok minoritas menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam usaha mereka “memperoleh” identitas yang kuat di masyarakat terutama pada aktifitas politik. Mereka membutuhkan identitas yang dapat diterima sebagai bagian kelompok mayoritas untuk memperoleh dukungan politik. Pada sisi itu, mereka yang diidentifikasi sebagai kelompok pendatang akan menegaskan diri sebagai bagian dari kelompok mayoritas dan kuat melalui identitas yang lebih netral dan diterima semua pihak. Sementara itu kelompok mayoritas dan kuat akan berupaya memiliki ko-identifikasi dengan kelompok minoritas yang memberikan kemungkinan identitas yang positif dalam ruang politik.

Penutup

Arena politik yang senantiasa menampilkan banyak pertunjukan (*show*) bahkan jamak disebut sebagai panggung pemain sandiwara memungkinkan lahirnya apa yang disebut sebagai manipulasi identitas dan etnik situasional. Seseorang dapat saja menyembunyikan identitas yang dianggap merugikan secara politik dan menonjolkan identitas lain yang menguntungkan. Aktifitas komunikasi politik sebagai salah satu yang paling menonjol dalam upaya menunjukkan jati diri seorang politisi atau anggota DPRD menjadi wadah eksploitasi identitas-identitas yang dimiliki. Dalam hal ini, identitas yang dikomunikasikan menjadi sangat kontekstual dan situasional. Seorang anggota DPRD di Kota Palu misalnya bisa saja mengaku sebagai pendatang, orang Palu atau orang Jawa tergantung kepada siapa ia berkomunikasi atau untuk tujuan apa komunikasi politik itu dilaksanakan. Dari sini kita dapat menyatakan bahwa, perspektif etnik situasional sangat menarik untuk mengamati dan memahami makna dibalik aktivitas politik dan perilaku komunikasi politisi terutama pada daerah multietnik.

Daftar Pustaka

- Armstrong, M. Jocelyn. 1986. *Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysia*. NIU: Center for Southeast Asian Studies.
- Arriani, Lely. *Kekerasan dalam Komunikasi Politik*, 2006. Disertasi pada Pascasarjana Komunikasi Unpad.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Terjemahan Nining I Susilo. Jakarta. UIP
- Lingkar Survey Indonesia. *Faktor Etnis dalam Pilkada: Politik Etnisitas dan Politik Identitas dalam Politik*. Kajian Bulanan. Edisi 09 Januari 2008
- Mulyana, Deddy. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Suparlan, Parsudi. 2003. *Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia*. Jakarta. INIS Universitas Leiden-PBB UIN Syarif Hidayatullah.
- Suryadinata, Leo, dkk. 2003. *Penduduk Indonesia : Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. LP3ES
- Tomagola, Thamrin Amal. 2006. *Republik Kapling*. Resist Book